

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Pengertian MBS

MBS merupakan salah satu perwujudan reformasi pendidikan yang menawarkan penyediaan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik kepada sekolah. Otonomi dalam manajemen menjadi potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada pihak-pihak terkait, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pendidikan.

Sejalan dengan jiwa desentralisasi dan otonomi bidang pendidikan, kewenangan sekolah turut berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses terbaik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut. Menurut Paul yang dikutip oleh Mulyono, mengatakan bahwa, "MBS sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua unsur kepentingan dengan sekolah secara

langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah”.¹

Menurut Bedjo Sudjanto yang dikutip oleh Irawan, “MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah”.² Adapun definisi MBS yang dikemukakan oleh Ogawa dan White yang dikutip oleh Rohiat, adalah sebagai berikut:

*School-Based Management (SBM) is one of form restructuring that has gained widespread. Like others, it seek to change the way school system conduct business. It is aimed squarely at improving the academic performance of school by changing their organizational design, Drawing on the experiences of existing programs.*³

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa, MBS adalah salah satu bentuk proses restrukturisasi yang memiliki hasil yang luas. Seperti pada umumnya, hal ini bertujuan untuk mengubah suatu sistem sekolah dalam melakukan bisnis. Hal itu dilakukan tepat pada peningkatan prestasi akademik dari sekolah mereka dengan mengubah desain organisasi, berdasarkan pengalaman dari program yang ada.

Menurut Oswald yang dikutip oleh Danim, MBS didefinisikan sebagai berikut:

School-Based Management can be defined as the decentralization of decision-making authority to the school site, is one of the most

¹Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA,2009), h.241

²Ade Irawan *et al.*, *Mendagangkan Sekolah* (Jakarta: ICW, 2004), h. 26

³Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktek* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hh.47-48

*popular strategies that came out of the 1980's school reform movement.*⁴

Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa, MBS dapat diartikan sebagai kebijakan desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan dari otoritas ke tingkat sekolah. Hal ini termasuk strategi paling populer yang keluar dari tahun 1980-an pada gerakan reformasi di sekolah.

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disintesisakan bahwa, MBS adalah bentuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi keseluruhan yang di lakukan sekolah secara mandiri dengan melibatkan semua *stakeholder* dan pihak-pihak terkait. Dari program yang dijalankan, diharapkan dapat terwujud mutu sekolah yang telah ditetapkan sejak awal.

2. Latar Belakang Munculnya Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah "*school based management*" atau yang selanjutnya dikenal dengan MBS mula-mula muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan sekolah atau pendidikan. Menurut Nurkholis yang dikutip oleh Hasbullah, "reformasi diperlukan karena kinerja sekolah selama puluhan tahun tidak dapat

⁴Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2008), h.35

menunjukkan peningkatan yang berarti dalam memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah”.⁵

Latar belakang munculnya MBS tak lepas dari rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. MBS merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai poros pengambilan keputusan.

Model MBS ini pada dasarnya sudah diterapkan di banyak Negara maju sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Namun baru diadaptasi secara resmi di Indonesia sekitar tahun 1992 oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan proyek perintisan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).⁶ Desentralisasi pada pendidikan dengan memberikan wewenang pada sekolah untuk mengontrol dan mengelola urusannya menghasilkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang lebih tinggi karena sekolah lebih mengetahui keperluan dan kondisinya.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Tujuan penerapan MBS adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pendidikan secara umum, terutama pada bidang manajerial. Lebih jauh dikemukakan Nurkholis seperti yang dikutip Mulyono bahwa tujuan

⁵ *Ibid.*, h.68

⁶ Hasbullah, *Op.Cit.*, hh.66-67

utama MBS adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.⁷

Peningkatan kualitas pendidikan yang hendak dicapai dengan penerapan MBS ini adalah meningkatkan efisiensi dan mutu penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan persentase pemerataan pendidikan di Indonesia. Baik berdasarkan pada kajian pelaksanaan MBS di berbagai negara maupun yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setidaknya ada empat aspek yang tercakup sebagai tujuan MBS, yakni kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.⁸

- a. Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolok ukur penilaian pada hasil, bukan pada metodologi atau proses.
- b. Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan menjamin keadilan sosial bagi setiap anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, dengan asumsi setiap anak memiliki potensi untuk belajar.
- c. Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di mana efektivitas berhubungan dengan proses pendidikan di sekolah sehingga menghasilkan hasil belajar yang sesuai harapan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan nilai uang yang dikeluarkan (*cost*) untuk memenuhi semua masukan (*input*) yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai.
- d. Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah atau pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, tugas dan wewenang sekolah serta komitmen semua *stakeholder*.

⁷Mulyono, *Op.Cit.*, h.245

⁸Umaedi, Hadiyanto dan Siswantari, *Manajemen Berbasis Sekolah: Buku Materi Pokok IDIK4012/2SKS/Modul 1-6 Edisi 1* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2011), hh. 4.8-4.10

Menurut Tim Pokja MBS Jawa Barat seperti yang dikutip Mulyono, implementasi MBS memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah;
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antarsekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.⁹

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan yang langsung berpusat pada bagaimana sekolah dan masyarakat bersinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada sekolah dalam upaya memaksimalkan kinerja dan hasil yang diharapkan.

4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Karakteristik MBS dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan,serta sistem administrasi secara keseluruhan. Menurut Saud yang dikutip oleh Mulyasa, berdasarkan pelaksanaan di Negara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasar MBS terdiri dari: a) pemberian otonomi yang

⁹Mulyono, *Op.Cit.*, h.244

luas kepada sekolah, b) partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, c) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional, d) serta adanya team work yang kompak dan transparan.¹⁰

Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru. Hal ini dilakukan agar guru lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar.

Melalui otonomi yang luas pula, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Diwujudkan dengan menawarkan partisipatif aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional dan professional.

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.

¹⁰Mulyasa, *Op.Cit.*, hh.35-38

Masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai narasumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional yang kuat. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan proses “*bottom-up*” secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.

Keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team-work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak.

5. Indikator Keberhasilan Program Manajemen Berbasis Sekolah

Suatu program pada umumnya memiliki indikator/tolak ukur yang dijadikan sebagai acuan penilaian tentang keberhasilan implementasinya.

MBS dianggap berhasil apabila:

- a. jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat sehingga keberhasilan MBS harus dilihat kemampuannya dalam menangani masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan,
- b. kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik karena dengan layanan pendidikan yang berkualitas, mengakibatkan prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa meningkat,

- c. tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar,
- d. program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat, maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik,
- e. terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga,
- f. semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik yang menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional,
- g. semakin baiknya iklim dan budaya kerja di sekolah. Iklim dan budaya kerja yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan,
- h. semua kemajuan pendidikan di atas telah tercapai, maka akan terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.¹¹

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disintesis bahwa indikator keberhasilan partisipasi terjadi apabila terjadi peningkatan kualitas layanan, program, maupun iklim dan budaya kerja yang berlangsung serta keterlibatan orang tua masyarakat yang tinggi dalam mendukung program-program yang telah dicanangkan dari awal, proses, hingga akhir program. Secara lebih rinci, keberhasilan implementasi MBS akan menghasilkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan.

¹¹Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.271

B. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi diterjemahkan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan pembagian peran. Partisipasi didapat dari masyarakat yang turut bekerja sama dalam suatu program yang akan dijalankan.

Partisipasi, secara etimologik berasal dari kata latin "*participation*" atau "*participation*" yang berarti "hal ikut serta atau hal ikut bagian", atau "pesertaan". Dengan demikian, "berpartisipasi" berasal dari kata "*participo*" atau "*particeps*" yang berarti mengikutsertakan seseorang dalam suatu aktifitas, atau membagi sesuatu dengan orang lain atau juga mengambil bagian dari suatu kegiatan. Sedangkan partisipatif berasal dari kata "*particeps* atau *participis*" yang berarti ikut ambil bagian atau ikut berbuat sesuatu dengan seseorang/kelompok.¹²

Secara umum partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Masyarakat terlibat secara aktif dan berperan dalam suatu program yang telah dirancang, melaksanakan proses, hingga mencapai tujuan dari suatu program tersebut.

Menurut Verhangen yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato, "partisipasi merupakan suatu bentuk khudu dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan

¹²Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Jakarta: FIP PRESS, 2012),h.46

manfaat". Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.¹³

Adapun pengertian partisipasi menurut Curtis *et al.*, yang dikutip Nasdian menyatakan bahwa, *"Participation is concerned with the distribution of power in society, for it is power which enables groups to determine which needs, and whose needs will be met through the distribution of resources."*¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, partisipasi berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, kekuasaan yang memungkinkan kelompok untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan, dan kebutuhan yang akan dipenuhi melalui penyebaran sumber daya.

Menurut Newstrom dan Davis yang dikutip oleh Nurhattati Fuad membatasi konsep partisipasi sebagai: *"Participation as a mental and emotional involvement of the persons in a group situation that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for*

¹³Mardikanto dan Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung:Penerbit Alfabeta,2013), hh.81-82

¹⁴Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014), h.91

them".¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan dan berbagi tanggung jawab mereka.

Selain itu seperti dikemukakan oleh Naryan yang dikutip oleh Dwiningrum, partisipasi memiliki pengertian: "*A valuentary process by which people including disadvantaged (income gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*".¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, partisipasi adalah proses yang wajar dimana masyarakat yang kurang beruntung (baik dari segi penghasilan, gender, suku, pendidikan) memengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses kerjasama individu yang berawal dari komunikasi untuk saling mendorong dalam kontribusi nyata dengan menentukan kebutuhan suatu kelompok yang akan memengaruhi hidup mereka. Partisipasi tercipta ketika suatu kelompok bersinergi dalam tercapainya suatu tujuan.

Berbicara tentang partisipasi, masyarakat merupakan subjek utama yang berperan penting dan terjun langsung dalam prosesnya. Menurut

¹⁵Fuad, *Op.Cit.*, hh.46-47

¹⁶Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), hh.50-51

Weber, yang dikutip oleh Syarbaini, Fatkhuri, dan Rusiyanta, “masyarakat diartikan sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya”.¹⁷ Menurut Sumardjan dikutip oleh Syarbaini, Fatkhuri, dan Rusiyanta memberi definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹⁸

Kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antar-manusia merupakan ruh dari kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Gellner yang dikutip Syarbaini, Fatkhuri, dan Rusiyanta bahwa “masyarakat dapat dilihat dari bentuk hubungan yang ada diantara manusia.”¹⁹ Yang berarti hubungan ini didasari oleh adanya kepentingan bersama yang mengikat antara individu satu dengan yang lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat disintesis bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu baik dari segi fisik maupun dari segi emosional terhadap pencapaian tujuan organisasi untuk turut serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi masyarakat menuntut individu saling percaya dan terikat satu sama lain.

¹⁷Syarbaini, Fatkhuri, Rusiyanta, *Konsep Dasar: SOSIOLOGI&ANTROPOLOGI: Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka Jakarta, 2012),h.146

¹⁸*Ibid.*,h.146

¹⁹*Ibid.*,h.145

2. Latar Belakang Partisipasi Masyarakat

MBS merupakan satu model pengelolaan sekolah yang sangat menekankan partisipasi seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Elemen yang dimaksud bukan saja dalam bentuk partisipasi orang tua siswa, melainkan juga masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan lembaga social lainnya, disinilah letak pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 4 disebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.²⁰ Hal ini yang akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai andil besar dalam maju dan berkembangnya pendidikan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan suatu lembaga pendidikan dapat melaksanakan program-program kerjanya secara lebih baik dan tetap berada di bawah pengawasan masyarakat sehingga tercipta transparansi dan keterbukaan. Menurut Nurhattati, secara kongkrit tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah:

²⁰Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hh.177-178

- a. Meningkatkan kualitas
- b. Pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik;
- c. Berperan memahami kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini;
- d. Berguna dalam mengembangkan program pendidikan ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.²¹

Partisipasi masyarakat akan menghasilkan tujuan suatu lembaga pendidikan dicapai secara efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya memperoleh pendidikan tetapi juga berkewajiban turut serta mengambil bagian dalam program penyelenggaraan pendidikan tersebut. Keberhasilan suatu program tidak akan terwujud bila tidak adanya peran serta masyarakat.

Seperti dikemukakan oleh Umadi yang dikutip oleh Nurkolis, dalam MBS partisipasi masyarakat memiliki tujuan utama, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat termiskin di daerah pedesaan
- b. Mendorong partisipasi anggota masyarakat lokal terhadap pendidikan anak-anak mereka
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.²²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesisakan bahwa partisipasi dalam MBS memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu pihak sekolah dalam pengembangan program-program yang dimiliki agar masyarakat merasakan langsung keberhasilan

²¹Fuad, *Op.Cit.*,h.50

²²Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h.127

maupun hambatan-hambatan yang terjadi sebagai pengguna jasa pendidikan yang nyata. Masyarakat secara bertahap mengetahui solusi pemecahan terhadap masalah yang terjadi di dunia pendidikan.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Untuk mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan di satuan pendidikan, sudah sepatutnya kepala sekolah melalui tokoh-tokoh masyarakat menggugah perhatian mereka. Menurut Dusselroep yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.²³

Adapun beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:

- 1) Dewan Pendidikan
- 2) Komite Sekolah
- 3) Persatuan Orang Tua Siswa
- 4) Perkumpulan olah raga
- 5) Perkumpulan kesenian
- 6) Organisasi-organisasi yang lain²⁴

²³ Mardikanto dan Soebiato, *Op.Cit.*,h.84

Menurut Basrowi yang dikutip Dwiningrum, “partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”.²⁵ Partisipasi fisik yaitu partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan.

Selain itu partisipasi dapat berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan.²⁶ Masyarakat saat ini diharapkan mempunyai kesadaran tinggi untuk membantu pemerintah dalam program penyelenggaraan pendidikan. Tanpa bantuan masyarakat, akan terjadi ketimpangan dan kesulitan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat melalui beragam bentuk-bentuk kegiatan. Adapun secara ringkas, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara

²⁴Pidarta, *Op.Cit.*,h.188

²⁵Dwiningrum, *Op.Cit.*,h.58

²⁶Mulyasa, *Op.Cit.*,h.170

nyata dengan cara terjun langsung ke lapangan membantu pengembangan program-program dan mengontrolnya, dapat pula melalui sumbangan dana, maupun ide/gagasan yang berguna dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dalam partisipasi masyarakat di dalam implementasi MBS, yaitu:

a. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai pemegang control utama dalam pengambilan keputusan.

b. Guru

Sebagai pelaksana program-program yang telah dicanangkan.

c. Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai wadah dan forum-forum dalam partisipasi masyarakat agar terwakili secara proporsional.

Ketiga pihak-pihak tersebut tersebut masing-masing mempunyai peran penting dan akan terwujud hasil yang optimal apabila pihak-pihak tersebut mau bersinergi dalam mewujudkan satu tujuan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.

4. Wadah Partisipasi Masyarakat

Seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dukungan

serta partisipasi masyarakat diperlukan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pemerintah, sekolah, maupun masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan merupakan lembaga yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta melakukan pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak ada hubungan hirarkis dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dewan pendidikan juga sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Keberadaan dewan pendidikan berlandaskan dari partisipasi masyarakat yang dimana dalam pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

b. Komite Sekolah

Tuntutan pengembangan yang diperlukan di sekolah untuk menampung dan menyalurkan keinginan stakeholder, pada akhirnya membentuk suatu forum yang mengakomodasinya, wadah ini diberi nama Komite Sekolah. Menurut Satori yang dikutip oleh Mulyono, "komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut

kepentingan kelembagaan sekolah.”²⁷ Lalu adapun hal-hal tersebut meliputi:

- 1) Penyusunan perencanaan strategi sekolah,
- 2) Penyusunan perencanaan tahunan sekolah,
- 3) Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah,
- 4) Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah,
- 5) Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah,
- 6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal,
- 7) Membahas laporan tahunan sekolah,
- 8) Memantau kinerja sekolah

Secara terperinci berdasarkan keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut: a) Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, b) Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, c) Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, dan d) Mediator (*Mediator Agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Komite sekolah bertujuan sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi masyarakat.

²⁷Mulyono, *Op.Cit.*, h.258

Dewasa ini kebijakan dalam program pendidikan di sekolah mengacu pada prakarsa masyarakat. Masyarakat dirasa lebih mengetahui tentang apa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan dituntut untuk berperan lebih di dalamnya.

Menurut Kepmendiknas RI No.044/U/2002, keanggotaan komite sekolah terdiri:

- 1) Unsur masyarakat yang bisa saja berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh dunia usaha/industri, organisasi profesi, tenaga kependidikan, wakil alumni, wakil peserta didik,
- 2) Unsur dewan guru/ yayasan lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 2 orang).

Dengan kondisi tersebut, komite sekolah diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsinya, melalui pelaksanaan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing lingkungan sekolah. Dimana komite sekolah juga dapat menjalankan fungsinya sebagai partner kepala sekolah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada.

5. Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Strategi diperlukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan diharapkan agar lebih tepat sasaran. Adapun strategi dalam membangun dinamika partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui langkah berikut:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*social awareness*) akan pentingnya pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dalam berbagai dimensinya. Kesadaran pentingnya pendidikan sebagai *factor determinan* kemajuan dan perubahan *social*, pada gilirannya juga menumbuhkan motivasi untuk melakukan perubahan mencapai taraf hidup lebih baik;
- b. Meningkatkan motivasi berpartisipasi, menciptakan iklim partisipatif terbuka, transparan, jelas, terencana, demokratis, berkesinambungan. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai pendidikan, mengakibatkan tumbuhnya motivasi berpartisipasi yang diwujudkan dalam proses partisipasi.²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, strategi perlu disusun secara matang. Dimulai dari menumbuhkan kesadaran masyarakat yang bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dalam peningkatan kualitas hidup. Setelah itu, diharapkan masyarakat dengan sendirinya akan turut berpartisipasi dalam memajukan dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan juga diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat, karena tanpa kepercayaan akan menimbulkan minimnya partisipasi dari sebuah kelompok masyarakat. Lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan suatu lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing di dunia luar.

²⁸Nurhattati Fuad, *Op.Cit.*,h.57

Bagaimanapun tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat berasal dari kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Artinya pemerintah mengakui adanya masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Masyarakat turut berperan dari awal hingga akhir yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program, turut andil dalam pengawasan, maupun melakukan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam hal pendidikan masyarakat sebagai *stakeholder* program-program yang dilaksanakan oleh sekolah.

Slamet dalam Mardikanto dan Soebiato menyatakan bahwa tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu: a) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, b) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, c) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.²⁹ Melalui penjelasan tersebut dapat disintesis bahwa ruang gerak juga harus diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Selanjutnya masyarakat dituntut agar mempunyai kesadaran yang tinggi dalam berpartisipasi dan memaksimalkan kinerja yang dimiliki dalam pelaksanaan partisipasi

²⁹Mardikanto dan Soebiato, *Op.Cit.*,h.91

6. Dampak-dampak Partisipasi Masyarakat

Dalam membantu identifikasi tingkat partisipasi diperlukan alat ukur atau indikator sebagai kunci pernyataan tentang hasil dan harapan dari tujuan yang ditetapkan bersama. Menurut Supeno yang dikutip Sumpeno, secara rinci keempat kategori ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerima hasil masyarakat
- b. Pelaksanaan
- c. Kontrol Partisipan
- d. Akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan.³⁰

Adapun Thomsen yang dikutip oleh Syafrizal memaparkan dampak dari partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, maka partisipasi dapat membangun perspektif yang beragam yang berasal dari beragam *stakeholders* dan mengakomodir pengetahuan local, pengalaman, dan kreatifitas, sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternative,
- b. partisipasi membantu transparansinya komunikasi, hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu/masalah,
- c. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iterative dan siklilal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal,dengan demikian kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan,
- d. partisipasi dapat mendorong kepemilikan lokal,komitmen dan akuntabilitas,
- e. partisipasi dapat mendorong kapasitas masyarakat dan modal social.³¹

³⁰Sumpeno, *Sekolah Masyarakat : Penerapan Rapid-Training-Design dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,2009), hh.138-141

³¹Syafrizal, Pembaharuan Gampong Secara Partisipatif, (<http://rajaubit.blogspot.com/2015/03/pembaharuan-gampong-secara-partisipatif.html?m=1>), diakses pada 10 Juni 2015 pada pukul 15.35 wib.

Setelah melihat pengertian, tujuan, bentuk, strategi, maupun dampak dari partisipasi masyarakat, dapat disintesis keberhasilan partisipasi masyarakat dikatakan berlangsung secara efektif dan efisien apabila melewati beberapa kondisi berikut:

- a. Terciptanya kontribusi masyarakat tersebut baik berupa gagasan, dukungan dana, barang maupun tenaga.
- b. Masyarakat lebih berinisiatif dalam mengikuti program penyelenggaraan pendidikan yang telah dicanangkan.
- c. Terbentuknya tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- d. Tersalurkannya aspirasi masyarakat yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuat sekolah.

C. Kajian Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian yang memiliki relevansi dan kesamaan kajian mengenai partisipasi masyarakat. Pertama, penelitian dilakukan oleh Sekar Ayuning Mawarni, yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Miftahul Jannah Jakarta yang menggunakan metode kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan di PKBM Miftahul Jannah diberikan oleh masyarakat

lembaga seperti pemilik catering memberikan agasan kepada PKBM agar siswa diberikan keterampilan memasak.

Masyarakat sekitar lingkungan PKBM juga memberikan saran agar siswa PKBM Miftahul Jannah lebih dapat menjaga lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk dana 90% dari ZIS masyarakat sebesar Rp 699.677.000,00. Selain dari ZIS Masyarakat dana didapat dari lembaga pemerintahan dana BOS/APBN sebesar Rp 44.500.000,00 dari Dinas Sosial DKI Jakarta sebesar Rp 37.500.000,00.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga pendidik diberikan oleh individu yaitu Ibu Lies A. Sujudi dan lembaga organisasi wanita KOWANI berupa seminar maupun pelatihan. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sarana yaitu seperti meja, bangku, buku-buku, alat, dan bahan untuk kegiatan keterampilan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Iis Almalia tentang "Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Program Sekolah di SDSN Menteng 03 Jakarta Pusat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pengelolaan program sekolah, komite sekolah turut berperan serta dalam bekerjasama dengan kepala sekolah dalam merancang program sekolah yang akan dilakukan pada 1 tahun kedepan. Komite sekolah juga berperan dalam menyampaikan ide masukan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan

program, komite sekolah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana dalam kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa pembangunan fasilitas sekolah yang tidak mendapatkan dana bantuan dari BOP dan BOS.

Sedangkan dalam pengawasan komite sekolah bekerjasama dengan kepala sekolah mengawasi program sekolah tersebut sampai dengan proses pengevaluasian. Dengan adanya partisipasi dari komite sekolah, sekolah sangat merasakan adanya peningkatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengevaluasian komite sekolah turut berperan serta, jika tidak ada partisipasi dari komite sekolah, sekolah hanya bisa memberikan standar layanan minimal.